



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 144 TAHUN 2025

**TENTANG
TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN TEMATIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tematik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tematik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN TEMATIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan susunan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tematik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas Pengarah, Ketua Tim, dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan dan petunjuk kepada seluruh anggota tim.

KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab dalam pengelolaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. sebagai narahubung pengelolaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik antara Unit Organisasi Eselon II dengan Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia selaku Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. melakukan koordinasi dalam penyusunan dan monitoring Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik di Unit Organisasi Eselon II masing-masing;
- c. melakukan koordinasi dalam memberikan dukungan terhadap Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik di Unit Organisasi Eselon II masing-masing; dan/atau
- e. melakukan koordinasi dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pengelolaan Reformasi Birokrasi General dan Tematik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, Anggota melakukan koordinasi dengan Pimpinan Unit Organisasi Eselon II masing-masing.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 374 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General dan Tematik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 222 Tahun 2024 tentang Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 222 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala LKPP Nomor 374 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General Dan Tematik di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Arif Rachman



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA
REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN
TEMATIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 144 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 OKTOBER 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN TEMATIK
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi
1.	Pengarah	1. Kepala LKPP	-
		2. Sekretaris Utama	Sekretariat Utama
		3. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
		4. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital	Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital
		5. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
		6. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
2.	Ketua Tim	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
3.	Anggota	1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi
		2. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		4. Inspektur	Inspektorat
		5. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
		6. Kepala Pusat Data dan Informasi	Pusat Data dan Informasi
		7. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		8. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
		9. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		10. Direktur Perencanaan, Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	Direktorat Perencanaan, Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan
		11. Direktur Sistem Pengadaan Digital	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
		12. Direktur Pasar Digital Pengadaan	Direktorat Pasar Digital Pengadaan

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi
		13. Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		14. Direktorat Sertifikasi Profesi	Direktorat Sertifikasi Profesi
		15. Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		16. Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		17. Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
		18. Ishamuddin Ahmad Syahid	Biro Perencanaan dan Keuangan
		19. Larasati Aisyah Retno Anjani	
		20. Yasmine Permata Sari	
		21. Himawan Giri Dahlan	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		22. Rita Agustini Sumardi	
		23. Mhd. Irsan Nasution	
		24. Mukti Herlambang	
		25. Ragil Cahyono	
		26. Cecep Sutisna	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		27. Ahmad Khairunnas	
		28. Joanne Salres Ramadhani	
		29. Teguh Islami Sriadiputra	
		30. Rydo Tama	Inspektorat
		31. Kemala Marsya Parahita	
		32. Setiaji Santoso	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
		33. Hery Fadhly Zulni	
		34. Nurkaidah	
		35. Beta Romadiyanti	

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi
		36.Ardian Hoppin Sitompul	Pusat Data dan Informasi
		37.Jidda Hadiyana	
		38.Mahendra Gilang Ramadhanara	
		39.Citra Yulian Kristanti	
		40.Ermawanto	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		41.Christy Irmawaty	
		42.Hima Tussafinah	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
		43.Arif Hilmi Aziz	
		44.Ivana Suprpto	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		45.Sofie Maghfira	
		46.Muhammad Qadr Siddiq Zam	Direktorat Perencanaan, Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan
		47.Pandu Taruna Kristianto Guterres	
		48.Meita Amelia	
		49.Mirayanti	
		50.Linda Azmi Mustikasari	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
		51.Alina Mahardhika Puspa	
		52.Niken Mustikarini	
		53.Made Widhiantika	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
		54.Elvenia Amras	
		55.Setiawan Rahandi Sabri	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		56.Dwi Nugraha Baregsi	
		57.Nabila Syamlan	

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan	Unit Organisasi
		58.Siti Ulyanah	Direktorat Sertifikasi Profesi
		59.Tri Angga Putra Pamungkas	
		60.Evaldo Hernendra Twinsa	
		61.Sari Melani	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		62.Aryandhika Sandya Nugraha	
		63.Wirdaningsih Filiya Ciptaningrum	
		64.Muhamad Dwi Sumanto	
		65.Andayani Nurfaizah	
		66.Abdul Gafur Darussalam	
		67.Abdul Aziz	
		68.Sri Aditya Nur Pratama	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		69.Fairuz Nawfal Hamid	
		70.Dipo Adi Negoro	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
		71.Yoma Triadi Busra	
		72.Moch. Ilham Riswanda	
		73.Rahmalita Fadhila	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA